

PENDIDIKAN DALAM RUU CIPTA LAPANGAN KERJA

20 Juli 2020

Fajri Siregar



PSHK

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

STRUKTUR PEMBAHASAN

1. Perspektif pemerintah pusat
2. Muatan pendidikan tinggi dalam RUU Cipta Kerja
3. Tantangan pendidikan tinggi
4. Tantangan pendidikan tinggi global
5. Potensi kontroversi
6. Tegangan dalam pendidikan tinggi



VISI PEMERINTAH PUSAT

Prinsip:

- Perluasan otonomi
- Pendanaan performance-based
- Deregulasi
- Debirokratisasi
- Kemitraan (berat di sisi kerja sama dengan industri)
- Merdeka Belajar (proses, substansi, interaksi, kultur yang unggul)

OMNIBUS LAW

PROBLEMATIKA

IZIN PERGURUAN TINGGI ASING YANG DIPERMUDAH

PELAKU USAHA PENDIDIKAN KEBAL SANKSI

WACANA MENGHAPUS MATA KULIAH AGAMA, KEWARGANEGARAAN

PENGAJUAN IZIN PEMBUKAAN PT ASING VIA BKPM - BUKAN KEMENDIKBUD

DOSEN WNI LULUSAN ASING TIDAK PERLU SERTIFIKASI DOSEN

PTS yang didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip nirlaba.

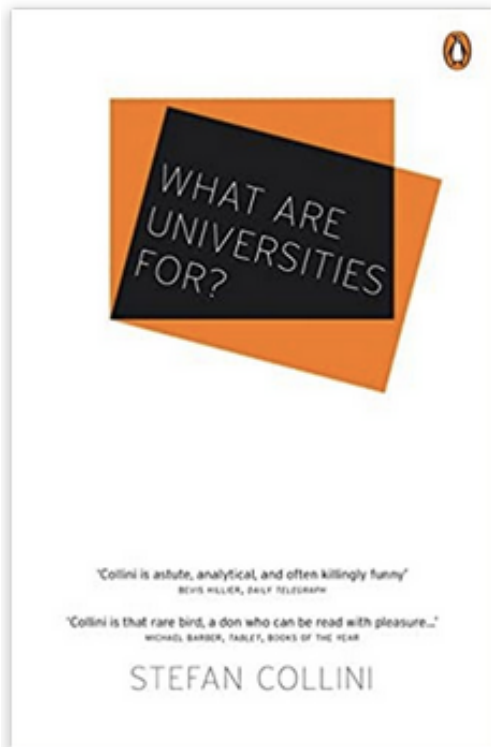
BAGAIMANA PUBLIK PERLU MENANGGAPINYA?

Prinsip	Tanggapan
Perluasan otonomi	Dukung – dengan konsekuensi untuk memaksa transparansi di tingkat PT.
Pendanaan performance-based	Kritis
Deregulasi	Kritis
Debirokratisasi	Dukung
Kemitraan (berat di sisi kerja sama dengan industri)	Kritis – ilmu pengetahuan tidak patut digantungkan kepada fungsi komersialisasi
Merdeka Belajar (proses, substansi, interaksi, kultur yang unggul)	Dukung

TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI DOMESTIK

- PENDIDIKAN TINGGI TIDAK *EMBEDDED* DALAM PEMBANGUNAN LOKAL
- TRIPLE HELIX TIDAK TERBANGUN LANTARAN EKONOMI YANG “TERBELAKANG”
- PEMBAHASAN SOAL PERAN PEMERINTAH DAERAH SULIT DILAKUKAN KARENA PEMBAHASAN SOAL PERAN PEMERINTAH DAERAH <> PEMERINTAH PUSAT TIDAK ADA
- DATABASE TIDAK TERMANFAATKAN DENGAN BAIK
- TRANSPARANSI DATA BAGI PUBLIK
- DATA AKURAT MENGENAI JALUR PENERIMAAN MAHASISWA, BIAYA KULIAH HINGGA ANGKA SERAPAN LAPANGAN KERJA TIDAK ADA (ANTAR LEMBAGA MEMILIKI INTERPRETASI YANG BERBEDA)

TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI DAN GLOBALISASI



..we are constantly asked to 'measure our productivity', to demonstrate the 'value added' by our teaching, to clarify the 'line management structure' of our administration, to quantify our 'public output', to accelerate our 'student throughput', to increase our 'brand recognition',..

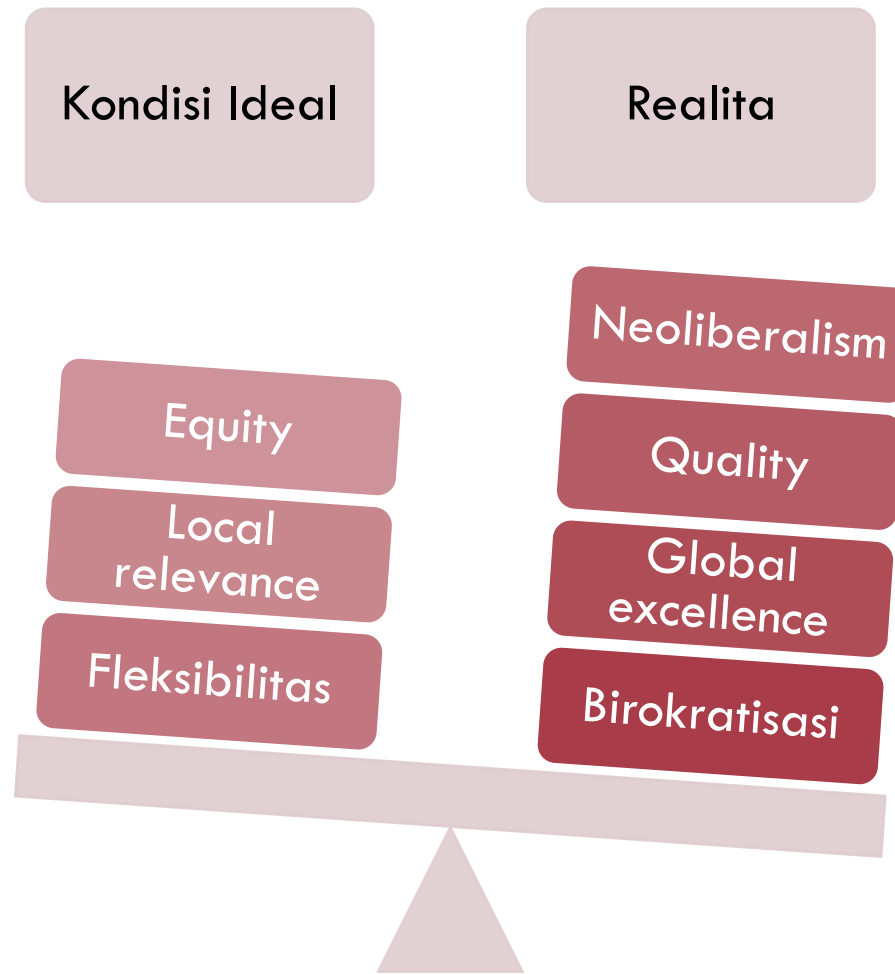
..universities are increasingly required to operate with a narrowly financial or commercial notion of 'efficiency' which is equated with increased output at reduced cost.

"There is obviously something lacking in our public discourse if the only acceptable justification for spending money is that it contributes to making more money." Collini, 2012: 137

POTENSI KONTROVERSI

- PERUBAHAN IMPLEMENTASI TRI DHARMA (REVISI UU SISDIKNAS)
- STATUS DOSEN MASA DEPAN (REVISI UU SISDIKNAS)
- PERGURUAN TINGGI ASING
- SOSHUM VS EKSAKTA

TEGANGAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI



TERIMA KASIH

